

JURNAL
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA REHABILITASI KORBAN
NARKOTIKA DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA
BERDASARKAN UU NO 35 TAHUN 2009



Diajukan Oleh :

NOVANLY DEKKY ARDIAN

NPM : 100510220

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA REHABILITASI KORBAN NARKOTIKA DI
WILAYAH KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN UU NO 35 TAHUN 2009**



Diajukan Oleh :

NOVANLY DEKKY ARDIAN

NPM : 100510292

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 11 Juni 2015

**Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H.,
M.Hum**

Tanda Tangan:

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

- I. Judul** : Kebijakan Hukum Pidana Rehabilitasi Korban Narkotika Di Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009
- II. Nama** : Novanly Dekky Ardian, Prof. Dr. Drs Paulinus Soge, S.H., M.Hum
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

The title of this legal writing is "The rehabilitation victims of criminal law policy of narcotics in the region in the Yogyakarta city based on regulation No. 35 of 2009". The problem formulations are: How the implementation of the rehabilitation of victims of Narcotics in the city of Yogyakarta based on regulation No. 35 Year 2009 on Narcotics? and How the barriers that lead to the rehabilitation of the victims of Narcotics in the city of Yogyakarta less efficient to do?. The research method used is normative legal method that focuses on laws and regulations. The legal basis used are the regulation No. 35 of 2009 on narcotics and regulation No. 5 of 1997 on psychotropic substances. Based on the data, it can be concluded that in the implementation of the rehabilitation of victims narcotics in the Yogyakarta city based on regulation no. 35 year 2009 on narcotics still there is a discrepancy between the sop rehab regulation with government regulations governing the rehabilitation of victims of Narcotics. Based on the constraints, the writer gives some suggestions so that there should be a regulation suitability of soup rehab with regulation No. 35 of 2009 on narcotics to avoid mistakes in handling the rehabilitation of drug abusers and the active role of the government must be able to organize services for integrated rehabilitation corresponding government obligations contained in the 1945 Constitution, Article 34 (3) in order to meet the infrastructure and adequate facilities in the rehab Narcotics.

Keywords: rehabilitation, narcotics, victims, regulation

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat adiktif yang menyebabkan kehilangan kesadaran dan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika meningkatkan daya imajinasi manusia dengan merangsang saraf pada otak untuk bekerja di luar nalar manusia. Pengaruh Narkotika menyebabkan meningkatnya aktifitas tubuh dan kemampuan seseorang secara optimal. Secara psikologis, Narkotika menyebabkan gejala halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi . Penggunaan dalam dosis yang berlebihan akan mengakibatkan kerusakan jaringan pada otak dan yang lebih parah menyebabkan overdosis, bahkan meninggal. Di Indonesia sendiri kurang lebih 2,2 persen atau 4,2 juta orang menyalahgunakan Narkotika dan menggunakan Narkotika dengan berbagai jenis tanpa mengetahui resiko - resiko penggunaan Narkotika .

Pemberantasan Narkotika di kota Yogyakarta sudah lama dicanangkan, sebagai upaya pembenahan moralitas bangsa. Tidak hanya pengguna yang berperan secara pribadi untuk terlepas dari ketergantungan menggunakan Narkotika, tetapi sudah seharusnya seluruh lapisan masyarakat ikut berperan aktif untuk mencegah atau menyadarkan pengguna untuk berhenti mengkonsumsi Narkotika. Rehabilitasi tentunya akan berjalan lancar apabila terdapat regulasi atau Standard operating procedure (SOP) yang sesuai dengan ketentuan rehabilitasi yang diatur oleh undang - undang. Sehingga diperlukan penyelarasan ketentuan dari pihak panti rehabilitasi agar

melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang rehabilitasi, dan peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan demi kelancaran proses rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika.

Fakta yang terjadi pada pengguna Narkotika di wilayah Yogyakarta, 25 % dari 29.710 atau 11884 orang yang menjadi pengguna Narkotika kembali menggunakan Narkotika setelah dilakukan upaya rehabilitasi . Hal ini terjadi dikarenakan adanya regulasi yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah untuk berperan aktif dalam upaya rehabilitasi terhadap korban Narkotika. Bertolak dari fakta tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Rehabilitasi Korban Narkotika Di Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi rehabilitasi korban Narkotika di wilayah kota Yogyakarta berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
2. Bagaimanakah hambatan yang menyebabkan rehabilitasi pada korban Narkotika di wilayah kota Yogyakarta kurang efisien untuk dilakukan ?

C. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normative, yang dimaksud dengan penelitian hukum

normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹

Serta di dukung dengan Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang objek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

BAB II : Tinjauan Tentang Kebijakan Hukum Pidana Rehabilitasi Korban Narkotika Di Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Dan Kendala – Kendala Terhambatnya Proses Rehabilitasi

A. Tinjauan Kebijakan Hukum Pidana, Rehabilitasi Narkotika Dan Panti Rehabilitasi Narkotika

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga Negara).

¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

2. Pengertian Rehabilitasi Narkotika

Rehabilitasi yaitu pemondokan yang dilakukan agar pengguna obat terlarang dapat kembali sehat. Sehat di sini meliputi sehat jasmani atau fisik, jiwa, sosial, dan rohani atau keimanan. Rehabilitasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu /re·ha·bi·li·ta·si/ réhabilitasi /pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yg dahulu (semula), atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yg berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat².

3. Macam - Macam Rehabilitasi Narkotika

Rehabilitasi narkotika secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Secara umum, rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar

² Kamus besar bahasa indonesia

bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

4. Tujuan Rehabilitasi.

Rehabilitasi sebagai suatu proses pemulihan korban dari gangguan penggunaan Narkotika baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang, yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu di masyarakat.

5. Pengertian Panti Rehabilitasi Narkotika

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud panti yaitu tempat atau kediaman (tempat) untuk digunakan . Sedangkan rehabilitasi Narkotika memiliki artian yaitu yaitu pemondokan yang dilakukan agar pengguna obat terlarang dapat kembali sehat. Sehat di sini meliputi sehat jasmani atau fisik, jiwa, sosial, dan rohani atau keimanan. Sehingga secara keseluruhan panti rehabilitasi Narkotika yaitu tempat atau kediaman untuk melakukan proses pemondokan untuk para pengguna Narkotika untuk memulihkan baik fisik maupun jiwa, sosial dan rohaninya agar terhindar dari pengaruh buruk Narkotika.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Insubordinasi

1. Pengertian Narkotika

Narkotika yaitu obat-obatan yang mampu mengganggu sistem kerja saraf tubuh untuk tidak merasakan sakit atau rangsangan. Secara umum

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh – pengaruh tertentu bagi orang – orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya kedalam tubuh.

2. Penggolongan dan Jenis Narkotika

Secara umum penggolongan jenis – jenis Narkotika telah diatur didalam Bab III Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada Pasal 6 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa Narkotika di golongkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Narkotika Golongan I : Berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak dipergunakan untuk therapi atau pengobatan. Contoh: Heroin, Kokain, dan Ganja.
- b. Narkotika Golongan II : Berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Digunakan untuk therapi pilihan terakhir. contoh: Contoh Morfin, Petidin, dan Metadon.
- c. Narkotika Golongan III : Berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam therapi. Contoh : Codein.

C. Implementasi Rehabilitasi Korban Narkotika Di Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009

Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika menganut system treatment sebab rehabilitasi terhadap pecandu merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pembedaan yang dimaksudkan pada aliran teori

treatment yaitu untuk memberikan tindakan perawatan (Treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku sebagai pengganti penghukuman. Pelaku kejahatan Narkotika adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation). Rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika atau korban Narkotika juga menganut teori social defence sebab merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan penyalahguna Narkotika ke dalam tertib sosial agar penyalahguna tidak lagi melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Permasalahan yang terjadi terhadap rehabilitasi di wilayah kota Yogyakarta yaitu masih adanya regulasi yang menjadi SOP panti rehabilitasi yang tidak selaras dengan peraturan pemerintah yang mengatur masalah rehabilitasi terhadap korban Narkotika. Seperti misalnya dalam pelaksanaan program rehabilitasi terpadu dalam Pasal 58 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat, akan tetapi dalam regulasi yang diatur dalam SOP rehabilitasi seringkali tidak sesuai dengan aturan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana panti rehabilitasi tidak melaksanakan rehabilitasi sosial. Panti rehabilitasi hanya melakukan tindakan rehabilitasi medis bagi penyalahguna Narkotika. Seharusnya ada regulasi yang selaras antara peraturan pemerintah dengan SOP yang merupakan hak yang dimiliki oleh panti rehabilitasi, agar didalam penyembuhan penyalahgunaan Narkotika, korban dapat di rehabilitasi dengan optimal sehingga tidak lagi menyalahgunakan Narkotika.

D. Hambatan Yang Menyebabkan Rehabilitasi Pada Korban Narkotika Di Wilayah Kota Yogyakarta Kurang Efisien Untuk Dilakukan

1. Kurangnya keselarasan regulasi.

SOP atau regulasi yang dibuat oleh panti rehabilitasi dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam SOP yang ditetapkan pihak panti rehabilitasi sering kali tidak sesuai dengan aturan yang ada di UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan dari pihak panti rehabilitasi yang seharusnya sesuai dengan pengaturan undang – undang akan tetapi realitanya justru menyalahi aturan dari undang – undang sehingga terdapat penyimpangan terhadap regulasi yang mengatur.

2. Terbatasnya jumlah panti rehabilitasi yang memiliki fasilitas memadai di wilayah Yogyakarta.

Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah Yogyakarta untuk memfasilitasi program rehabilitasi Narkotika di wilayah Yogyakarta membuat terhambatnya proses rehabilitasi bagi penyalahguna atau korban Narkotika..

3. Kurangnya personil atau tenaga pembantu yang dapat menangani pasien secara khusus.

Penanganan terpadu dibutuhkan oleh penyalahguna atau korban Narkotika, sehingga dibutuhkan tenaga pembantu rehabilitasi yang mau mengawasi secara khusus agar penyalahguna atau korban Narkotika dapat menjalani rehabilitasi dengan baik. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya tenaga yang secara khusus mengawasi secara individual

penyalahguna Narkotika atau korban Narkotika yang direhabilitasi di panti rehabilitasi. Karena tidak semua tenaga pembantu dan pengawasan dari pihak panti rehabilitasi dapat mengawasi secara terpadu, satu per satu.

4. Sulitnya melakukan pendekatan terhadap penyalahguna atau korban Narkotika.

Hal ini terjadi karena sering kali penyalahguna atau korban Narkotika masih mengalami depresi akut pasca dihentikannya dari penggunaan Narkotika, sifat yang sering kali muncul yaitu pasien sulit dikendalikan dan masih muncul sifat membangkang dari penyalahguna atau korban Narkotika tersebut, sehingga menyulitkan proses rehabilitasi.

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab – bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam implementasi rehabilitasi korban Narkotika di wilayah kota Yogyakarta berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih terjadi ketidaksesuaian regulasi antara SOP panti rehabilitasi dengan peraturan pemerintah yang mengatur masalah rehabilitasi terhadap korban Narkotika. Seperti misalnya dalam pelaksanaan program rehabilitasi terpadu dalam Pasal 58 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkotika

diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat, akan tetapi dalam regulasi yang diatur dalam SOP rehabilitasi seringkali tidak sesuai dengan aturan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana panti rehabilitasi tidak melaksanakan rehabilitasi sosial.

2. Proses rehabilitasi Narkotika masih kurang efektif dilakukan di wilayah kota Yogyakarta karena masih adanya hambatan yang di hadapi oleh panti rehabilitasi Narkotika dalam melakukan proses rehabilitasi. Kendala – kendala yang dihadapi oleh panti rehabilitasi di wilayah Yogyakarta antara lain :

- a. Terbatasnya jumlah panti rehabilitasi yang memiliki fasilitas memadai di wilayah Yogyakarta.
- b. Kurangnya personil atau tenaga pembantu yang dapat menangani pasien secara khusus.
- c. Ketidaktersediaan obat – obatan yang digunakan untuk proses rehabilitasi medis bagi penyalahguna atau korban Narkotika
- d. Kurangnya informasi mengenai masalah utama yang dihadapi pasien, mengapa pasien menggunakan Narkotika.
- e. Kurangnya *controlling* (pengawasan) pasca rehabilitasi yang dilakukan oleh panti rehabilitasi terkait.
- f. Sulitnya melakukan pendekatan terhadap penyalahguna atau korban Narkotika.
- g. Masih maraknya peredaran Narkotika ilegal yang masuk ke panti rehabilitasi.

B. Saran

Upaya rehabilitasi merupakan upaya penting yang dapat dilakukan pemerintah maupun swasta untuk memulihkan penyalahguna atau korban Narkotika agar dapat terlepas dari jerat Narkotika, harus ada tindakan untuk menciptakan rehabilitasi yang berdaya guna untuk dilakukan kepada penyalahguna atau korban Narkotika. Hal yang dapat direkomendasikan adalah :

1. Harus ada kesesuaian regulasi dari SOP panti rehabilitasi dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar tidak terjadi kesalahan dalam menangani rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika, sehingga tidak terjadi penanganan yang tidak maksimal dari panti rehabilitasi narkotika
2. Harus ada peran aktif pemerintah untuk dapat menyelenggarakan layanan rehabilitasi terpadu sesuai kewajiban pemerintah yang termuat dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (3) agar dapat memenuhi sarana prasarana maupun fasilitas yang memadai di dalam panti rehabilitasi Narkotika.
3. Harus ada upaya lanjut dari semua pihak terkait, mulai dari panti rehabilitasi, masyarakat, keluarga , untuk mau mengawasi penyalahguna atau korban Narkotika yang sudah sembuh sekalipun, agar tidak lagi menggunakan Narkotika.
4. Peran penting panti rehabilitasi untuk mengawasi dan mempererat penjagaan dalam panti rehabilitasi sangat dibutuhkan karena masih adanya praktik penyelundupan Narkotika secara illegal ke dalam panti rehabilitasi.

Perlu ada perhatian khusus agar praktik – praktik memalukan yang dilakukan oleh oknum – oknum tertentu ini tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Chaerudin. 1997. *Victimologi, beberapa aspek korban kejahatan*. Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah, Jakarta.

Dirjosisworo Soedjono. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia (Kajian Hukum Diluar Kodifikasi)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Havari Dadang. 2001. *Penyalahgunaan dan ketergantungan NAZA*. Badan penerbit FKUI, Jakarta.

Herbert Parker. 1968. *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press, California.

Mulyadi Mahmud. 2008. *Criminal Policy (Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non- Penal Policy Dalam Penerapan Kejahatan*. Pustaka Bangsa, Medan.

Prasoko Djoko. 2001. *Kejahatan- Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara, Jakarta.

Sasangka Hari. 2003. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju Press, Bandung.

Taufik Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Bogor.

Wijaya, A.W. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*. Armico, Bandung.

Yatim Danny. 1991. *Kepribadian, Keluarga Dan Narkotika (Tinjauan Sosial-Psikologis)*. Arcan, Jakarta.

Perundang – Undangan :

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perpres RI Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor.

Skripsi :

Fornatanella Debora. 2005. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Rehabilitas Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Hendarwan Thomas Narpati. 2009. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Nurchahyo Alfonsus Rizky. 2012. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Penentuan Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Website :

<http://belajarsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba>

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/516363-bnn--pengguna>

<http://unisifm.com/sebaran-pengguna-narkoba-yogyakarta>

apapengertianahli.com/2014/10/pengertian-narkoba-apa-itu-narkoba

[lawskripsi.com/ pengertian narkotika menurut para ahli?/](http://lawskripsi.com/pengertian-narkotika-menurut-para-ahli/)

<http://id.wikipedia.org/>

<http://www.rri.co.id/post/berita/107099/ruang publik/bnnp diy desak peningkatan pusat rehabilitasi narkoba.html>

<http://stopnarkobaa.blogspot.com/2014/02/sejarah-narkotika.html>